



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI DI TENGAH LAMBATNYA BELANJA NEGARA

**Fauzan Lazuardi Ramadhan**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[fauzan.ramadhan@dpr.go.id](mailto:fauzan.ramadhan@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau setara dengan 15,3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,37 persen secara tahunan (*year-on-year/YoY*), terutama karena adanya pembukaan blokir anggaran. Namun, jika ditelaah lebih dalam, realisasi belanja pemerintah pusat justru mengalami penurunan sebesar 3,37 persen menjadi Rp413,2 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah justru meningkat signifikan, tumbuh 12,36 persen menjadi Rp207,1 triliun.

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, mengkhawatirkan rendahnya realisasi belanja negara dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi Triwulan (TW) I 2025. Hal ini terjadi akibat selama ini belanja pemerintah, khususnya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) berperan penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, khususnya melalui proyek pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan kondisi yang ada, Badiul Hadi, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada TW I 2025 hanya sebesar 4,5—4,75 persen.

Kekhawatiran ini sejalan dengan prediksi International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,7 persen pada 2025; 4,8 persen pada 2026; dan 5 persen pada 2027. Penurunan proyeksi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah (i) tantangan dalam percepatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya di segmen kelas menengah; (ii) dinamika kebijakan, baik di tingkat domestik maupun global, yang memerlukan respons adaptif; serta (iii) ketidakpastian arah perdagangan internasional yang turut berdampak pada arus investasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Indonesia, mengingat target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 cukup ambisius. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2025 dan meningkat hingga 8 persen pada 2029. Tentunya, perlu kebijakan dan langkah strategis yang tepat dari Pemerintah Indonesia guna mencapai target yang telah ditetapkan dan mampu mengeluarkan Indonesia dari *middle income trap* dan menjadi negara maju.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia tetap optimis. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa ekonomi Indonesia justru diliputi oleh optimisme, hal ini didasarkan pada data inflasi yang hanya sebesar 1,65 persen pada Bulan Maret 2025 secara *month-to-month* (MoM) yang mengindikasikan konsumsi rumah tangga terjaga. Selain itu, tercapainya target investasi pada TW I juga diprediksi akan menguatkan ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan tetap mencapai 5 persen, hal ini dikarenakan dampak bagi Indonesia dari perdagangan internasional akibat kebijakan Amerika Serikat (AS) relatif lebih kecil dibanding negara seperti Thailand.

Tahun 2025 merupakan tonggak penting bagi Indonesia dalam menapaki target pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2029. Jika momentum tahun ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka pencapaian jangka menengah bisa semakin sulit diraih. Untuk itu, pemerintah perlu segera mengambil sejumlah langkah strategis.

*Pertama*, melakukan percepatan realisasi belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi terutama pada pos yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan proyek padat karya guna menumbuhkan tingkat konsumsi di masyarakat. *Kedua*, mendorong pertumbuhan investasi dengan melakukan reformasi serta optimalisasi kebijakan investasi dan perpajakan yang ada agar lebih ramah investor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan perlu pertumbuhan investasi 10 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. *Ketiga*, reindustrialisasi berbasis *value chain* dengan bergerak membangun ekosistem industri bukan hanya fokus pada hilirasi komoditas primer. *Keempat*, menaikkan upah riil dan pemberian perlindungan sosial bagi pekerja agar mampu mendorong konsumsi masyarakat. *Kelima*, memperkuat sektor keuangan domestik dan pembiayaan yang inklusif. Serta, *keenam*, menjaga stabilitas makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan fiskal negara.

## Atensi DPR

IMF dan Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih rendah, yakni 4,7 persen pada tahun 2025. Di sisi lain, perlambatan realisasi belanja negara pada TW I dikhawatirkan akan memengaruhi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, pemerintah melalui Mensesneg dan Menkeu tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5 persen di akhir tahun 2025. Menanggapi hal ini, DPR RI melalui Komisi XI perlu memperkuat fungsi pengawasan khususnya kepada Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional agar stabilitas makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan defisit fiskal negara tetap terjaga sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMN 2025—2029 melalui kebijakan yang akan dibuat. Selain itu, Komisi XI DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja negara terutama pada pos yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan proyek padat karya guna meningkatkan konsumsi domestik.

## Sumber

bisnis.com, 26 Februari 2025;  
 bloombergtechnoz.com, 25 April 2025;  
 cnnindonesia.com, 24 April 2025;  
 detik.co.id, 23 April 2025;  
 kemenkeu.go.id, 30 April 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Venti Eka Satya  
 Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Ully Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
 Ulayya Sarfina  
 Yosephus Mainake  
 M. Z. Emir Zanggi  
 M. Insan Firdaus  
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*